



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETIAWAN ASWAD
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 911286

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.285.062.000

1. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/72 m2 di KAB / KOTA
MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 1.220.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 330.062.000
4. Tanah Seluas 18722 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000
5. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 101 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 225.000.000

1. MOTOR, YAMAHA FREEI GO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VELOZ Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
215.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 255.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.630.590.417

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	5.395.952.417
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.395.952.417

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.